



PENYULUHAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN BIDANG SOSIAL BUDAYA DI SATUAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI TANGGUL HARAPAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Novita Wahyu Setyawati¹⁾, Endah Prawesti Ningrum²⁾

^{1,2)} Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi
Email : ¹⁾ Fara_kitty@yahoo.com

Abstrak

Pada Satuan Permukiman Transmigrasi Tanggul Harapan sudah berdiri kelembagaan pemerintahan maupun kelembagaan masyarakat, akan tetapi kelembagaannya belum berfungsi secara optimal. Hal ini dikarenakan belum adanya program kerja lembaga, kurangnya komunikasi antar pengurus dan anggota lembaga, serta terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan lembaga tersebut. Meskipun beberapa program pembinaan dan pelatihan telah dilakukan, namun program tersebut masih belum sepenuhnya tercapai. Tujuan Kegiatan penyuluhan ini untuk (1) Membentuk, menguatkan dan mengembangkan kapasitas lembaga pemerintah desa dan lembaga sosial budaya di satuan permukiman-permukiman transmigrasi agar menjadi fungsional; (2) Melaksanakan kaderisasi kepengurusan lembaga masyarakat sosial budaya. Metode kegiatan penyuluhan ini dilakukan dengan cara observasi, indepth interview, konseling, pembelajaran, konsultasi, dan evaluasi. Hasil kegiatan penyuluhan (1) Diperlukan peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program-program pendampingan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi; (2) Perlunya memelihara, memanfaatkan dan memberdayakan Kader-kader terlatih dari kegiatan ini; (3) Diperlukannya keberlanjutan akan program kelembagaan sosial budaya di lokasi Satuan Kimtrans Tanggul Harapan; (4) Diperlukannya dorongan atau motivasi khususnya SDM (baik pengurus, anggota pengurus dan warga) untuk masing-masing kegiatan kelembagaan.

Kata kunci : kelembagaan sosial budaya, satuan permukiman transmigrasi.

Abstract

In the Tangguh Transmigration Settlement Unit has been established institutional government and community institutions, but the institutional has not functioned optimally. This is because there is no institutional work program, lack of communication between the board and members of the institution, and the limited facilities and infrastructure to support the activities of the institution. Although several coaching and training programs have been conducted, the program has not yet been fully achieved. The purpose of this extension activity is to (1) Establish, strengthen and develop the capacity of village government institutions and socio-cultural institutions in transmigration settlement units to be functional; (2) Implementing the management of social and cultural institutions. This method of extension activity is done by observation, indepth interview, counseling, learning, consultation, and evaluation. Outcome of extension activities (1) Increased coordination, synchronization and integration of assistance programs and empowerment of transmigration communities; (2) The need to maintain, utilize and empower trained cadres; (3) Sustainability of socio-cultural institutional program in the location of Satuan Kimtrans Tanggul Harapan is required; (4) The need for motivation or motivation especially human resources (both board, member of board and citizen) for each institutional activity.

Keywords: socio-cultural institution, transmigration settlement unit.



I. PENDAHULUAN

Satuan Permukiman Transmigrasi Tanggul Harapan, secara administrative terletak di desa persiapan Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Penempatan transmigran pada tahun anggaran 2011/2012 dengan daya tampung awal 150 KK, jumlah penempatan sebanyak 350 KK dan jumlah KK/jiwa yang dibina saat ini sebanyak 350 KK/1375 jiwa.

Satuan Permukiman Transmigrasi Tanggul Harapan memiliki aksesibilitas yang relatif mudah dijangkau. Kendala fisik yang masih dikeluhkan warga adalah kondisi jalan penghubung ke kota kabupaten yang kondisinya belum teraspal sehingga debu jalanan sangat tinggi. Untuk menuju ke Satuan Permukiman Transmigrasi Tanggul Harapan dapat menggunakan kendaraan baik roda empat maupun roda dua serta perahu air/klotok. Ketersediaan sumber air bersih sudah ada, namun tidak berfungsi dengan baik. Untuk penerangan dan penunjang kegiatan ekonomi produktif masih mengandalkan generator non PLN dan energi listrik tenaga surya.

Luas lahan keseluruhan di Satuan Kimtrans adalah \pm 1394,17 Ha, dengan rincian sebagai berikut lahan pekarangan seluas 0,50 ha/KK, lahan usaha I seluas 0,50 ha/KK, lahan usaha II seluas 1 ha/KK, dan lahan fasilitas umum seluas 6 ha. Secara keseluruhan telah dibagikan dan dimanfaatkan untuk tanaman pangan, sayur-sayuran, dan perkebunan yang hasilnya sebagai pendapatan penghasilan ekonomi keluarga. Komoditas pertanian yang memiliki potensi ekonomi yang cocok dikembangkan pada lahan pekarangan adalah ketela pohon, ubi jalar, pisang, dan sayur-sayuran. Sedangkan pada Lahan Usaha I dikembangkan kelapa sawit, sedangkan mata pencarian dari sumber lain di Satuan Kimtrans Tanggul Harapan sebagai nelayan, petani, peternak, buruh pabrik dan membuka usaha warung.

Kondisi Sosial Budaya pada Satuan Permukiman Transmigrasi Tanggul Harapan Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan walaupun dihuni oleh lima kelompok etnis dari transmigran yang datang dari daerah yang berbeda. Ada yang berasal dari etnis Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Barat, NTB dan Lampung. Hingga sekarang belum pernah terdengar konflik dari ke lima etnis tersebut. Padahal jika ditelisik lebih jauh ternyata di Satuan Permukiman Transmigrasi Tanggul Harapan terdapat berbagai jenis suku yang berbeda, namun mereka saling menghargai.

Tingkat pendidikan untuk Kepala Keluarga di Satuan Permukiman Transmigrasi Tanggul Harapan, rata-rata berpendidikan setingkat SD, SMP, SMA, Akademi, dan Sarjana. Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk mereka tetap menerima informasi atau wawasan dari luar.

Pada Satuan Permukiman Transmigrasi Tanggul Harapan sudah berdiri kelembagaan pemerintahan maupun kelembagaan masyarakat, akan tetapi kelembagaannya belum berfungsi secara optimal. Hal ini dikarenakan belum adanya program kerja lembaga, kurangnya komunikasi antar pengurus dan anggota lembaga, serta terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan lembaga tersebut. Meskipun beberapa program pembinaan dan pelatihan telah dilakukan, namun program tersebut masih belum sepenuhnya tercapai.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka kegiatan penyuluhan pengembangan kelembagaan sosial budaya lebih ditekankan kepada peningkatan SDM bagi tenaga pembina/petugas/TKPMP, pengurus kelembagaan masyarakat, pengurus kelembagaan pemerintah desa dan masyarakat transmigrasi serta tenaga pendidik, tenaga kesehatan, tenaga mental spiritual dan tenaga yang aktif dalam partisipasi masyarakat seperti (Kepala Desa, tokoh masyarakat, petugas



siskamling, dan lain-lain) sehingga kelembagaan social budaya terus berjalan secara berkelanjutan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kelembagaan

Lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Dalam undang-undang yang dibuat pemerintah, disebutkan bahwa lembaga kemasyarakatan harus bekerja sama dengan pemerintah. Hal ini berguna agar semua aspirasi dari masyarakat luas dapat tersampaikan dan diwujudkan Lembaga Pemerintah yang paling terendah dan dekat dengan masyarakat adalah Desa yang di dalamnya ada perangkat desa, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga. Untuk kalangan pemuda dan ibu-ibu, lembaga kemasyarakatan yang biasa akrab dengan mereka adalah Karang Taruna dan PKK.

Karang taruna adalah wadah yang menampung segala aspirasi kaum muda Indonesia. Mereka dengan leluasa diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat dan ide-ide guna membangun daerahnya. Para anggota Karang Taruna juga dibekali berbagai keilmuan untuk memanfaatkan potensi daerahnya. Untuk ibu-ibu rumah tangga, pemerintah menyediakan lembaga kemasyarakatan berupa gerakan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga).

Lembaga kemasyarakatan tersebut bertujuan untuk menciptakan suasana keadaan sosial yang mandiri, sejahtera, dan maju, tanpa melihat status jenis kelamin. Para wanita, khususnya yang sudah berkeluarga dan memiliki putra-putri, dinilai mampu mencetak generasi yang lebih ramah dan pintar.

Lembaga-lembaga Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia dan Masyarakat dan lembaga masyarakat sosial dan pemerintahan desa yang telah terbentuk kemudian dikuatkan dan dikembangkan dengan cara meningkatkan komitmen atas nilai-nilai, tujuan kelompok, dan kepentingan yang telah disepakati bersama. Kelembagaan masyarakat dibentuk atas dasar kebutuhan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Dan diharapkan lembaga tersebut fungsional.

2.2. Transmigrasi

Transmigrasi sebagai kegiatan perpindahan penduduk yang berorientasi pada pembangunan tidak terlepas dari masalah yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Adapun masalah yang dihadapi adalah masalah kependudukan, pembangunan dan sosial ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 (merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang pokok-pokok transmigrasi). Tentang ketransmigrasian, penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, pemerataan pembangunan daerah serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sesuai dengan tujuan tersebut maka transmigrasi masih sangat relevan di era otonomi daerah saat ini.

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang transmigrasi juga menyebutkan : Melalui transmigrasi, sebagai salah satu bentuk mobilitas penduduk, akan terjadi pertemuan antar budaya kelompok masyarakat sehingga perlu pembinaan untuk mempercepat proses integrasi dan akulturasi. Proses ini akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, yang akan menjadi Bangsa Indonesia yang memiliki kekuatan sinergi dalam melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan



kesejahteraan, meningkatkan dan meratakan pembangunan daerah, serta memantapkan ketahanan nasional yang didasarkan pada wawasan nusantara.

Dengan demikian karena masalah penduduk ini adalah masalah yang sangat kompleks, maka sangatlah penting ditetapkan ketentuan-ketentuan sebagai pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang ini bahwa yang dimaksud dengan transmigrasi dan transmigran adalah :

1. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah.
2. Transmigran adalah warga Negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi.

Tujuan Transmigrasi Program transmigrasi ditunjukkan untuk dua hal, yaitu:

1. Untuk memberikan peluang berusaha dan kesempatan bekerja kepada anak bangsa ini secara terintegrasi dengan upaya pemberdayaan potensi sumberdaya kawasan yang belum dimanfaatkan dan dikelola.
2. Untuk jangka panjang, adalah untuk menciptakan kondisi yang mendorong terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa sebagai pilar utama berdiri tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

III. METODE PELAKSANAAN

Pendekatan Partisipatory

PRA merupakan teknik pengumpulan informasi dan pengenalan kebutuhan masyarakat yang melibatkan secara langsung dan secara aktif partisipasi masyarakat. Dalam kaitan tersebut beberapa prinsip dasar yang harus diterapkan dalam pelaksanaan PRA adalah

Melibatkan seluruh kelompok masyarakat yang merupakan representasi masyarakat desa secara umum dalam pengenalan potensi sumber daya setempat, pemahaman permasalahan yang dihadapi, mengidentifikasi jenis kebutuhan, dan merumuskan pentahapan kegiatan kelembagaan masyarakat di satuan permukiman transmigrasi.

Metode PRA (participatory Rural Appraisal) ini digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terutama dalam menyusun kebutuhan atau program.

Metode yang digunakan dalam penyuluhan adalah:

Pertama, observasi (pengamatan) mendalam. Dalam metode ini pendamping mendapatkan data (informasi) tentang kondisi lokasi dan masyarakat melalui pengamatan secara mendalam terhadap situasi, kondisi kejadian (peristiwa) yang ada di lokasi permukiman, baik fisik lingkungan maupun sosial.

Kedua, wawancara tak terstruktur (*indepth interview*). Hal-hal yang tidak bisa dipahami melalui kegiatan pengamatan lapangan, diperoleh melalui wawancara mendalam dengan masyarakat, baik tokoh-tokoh, maupun warga masyarakat pada umumnya.

Ketiga, Konseling yakni membantu menggali masalah dan potensi yang dimiliki, membuka alternative-alternatif solusi dan mendorong masyarakat untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan bertanggungjawab.

Keempat, Pembelajaran yaitu alih pengetahuan/ketrampilan dan system nilai yang dimiliki oleh penyuluh melalui pertemuan-pertemuan dan praktek keterampilan

Kelima, konsultasi yaitu upaya memberikan jawaban, solusi dan pemecahan masalah yang dibutuhkan oleh masyarakat warga transmigran.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kondisi Demografi

Data Penduduk dan Sumber Mata



Pencapaian Masyarakat di Satuan Kimtrans Tanggul Harapan Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan. Secara rinci dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1 Data Penduduk

| No | Uraian | Jumlah | |
|----|-----------------------------------|--------|------|
| 1. | Jumlah Penduduk | 1375 | jiwa |
| 2. | Laki-laki | 721 | Jiwa |
| 3. | Perempuan | 654 | jiwa |
| 6. | Jumlah Total KK (Kepala Keluarga) | 350 | KK |

4.2. Berdasarkan Pendidikan

4.2.1. Pendidikan Formal

Dalam upaya pelayanan pendidikan untuk warga Transmigran, maka dibangun sekolah di Satuan Kimtrans Tanggul Harapan. Keadaan pendidikan di Kimtrans ini sebagai berikut :

- A. Sekolah Taman Kanak-Kanak
 - Guru : 5 orang
 - Murid : 24 orang
- B. Sekolah Dasar
 - Bangunan : 2 unit
 - Guru : 4 orang (PNS)
 - Guru : 7 orang (Honor)
 - Murid : 148 orang

Satuan Kimtrans Tanggul Harapan sudah tersedia layanan pendidikan PAUD/TK walaupun dalam kegiatan belajar mengajar menggunakan bangunan balai desa dan tersedia juga layanan pendidikan Sekolah Dasar, yaitu SDN 01 Satuan Permukiman Transmigrasi Tanggul Harapan Dimana pada Sekolah Dasarnya (SD) sudah dilengkapi dengan perpustakaan, akan tetapi di perpustakaanannya masih membutuhkan banyak buku bacaan. Untuk kualitas tenaga pendidik (guru) di Satuan Kimtrans Tanggul Harapan baik PAUD/TK dan SD sudah ada yang mengikuti seminar atau pelatihan tentang penyusunan dan pelaporan RKH (Rencana Kerja Harian), serta pengajaran dan pembelajaran murid, sedangkan untuk materi kurikulum ajaran PAUD/TK dan SD disesuaikan dengan

kurikulum di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Seruyan. Sarana pendidikan SMP dan SMA di Satuan Kimtrans Tanggul Harapan belum tersedia, baru tersedia diluar lokasi Kimtrans tepatnya di Desa Bangun Harja dan Kartika bhakti Kec. Seruyan hilir timur.

4.2.2. Pendidikan Non Formal

Pendidikan non formal disini adalah kursus (latihan) yang diberikan oleh Pembina dari Dinas Kependudukan dan Transmigrasi maupun instansi teknis yang terkait kepada warga transmigran.

Jenis dan peserta kursus atau latihan di Satuan Kimtrans Tanggul Harapan ini adalah sebagai berikut :

- Ketrampilan usaha tani / motivasi : 35 orang
- Kewirausahaan : 5 orang
- Ketrampilan pembuatan keripik : 5 orang
- Kepemimpinan dan pembangunan desa : 5 orang
- Kesehatan : 6 orang
- Intensifikasi lahan pekarangan : 150 orang

4.2. Hasil Pembahasan

Hasil pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, serta FGD yang dilakukan, didapatkan pemetaan masalah dan potensi yang ada. Berikut adalah hasil pemetaan masalah dan potensi pada jenis lembaga:

Pendidikan, dimana permasalahan yang ada dilapangan adalah kurangnya buku-buku bacaan di perpustakaan SD, kurangnya peralatan dan perlengkapan belajar mengajar dan alat-alat permainan untuk PAUD/TK, dan tidak adanya biaya untuk dapat melanjutkan pendidikan kejenjang SMP/SMA/Universitas. Potensi yang ada, yaitu: semangat belajar dan membaca bagi murid PAUD/TK dan SD walaupun keterbatasan peralatan dan perlengkapan KBM dan semangat belajar



bagi warga yang hendak melanjutkan pendidikan kejenjang SMP/SMA/Universitas.

Mental spiritual, dimana permasalahan yang ada adalah kurangnya peralatan dan perlengkapan di mushollah dan masjid. Potensi yang ada, yaitu: semangat anak-anak untuk belajar mengaji walaupun terbatas peralatan dan perlengkapan penunjangnya dan semangat warga Kimtrans Tanggul Harapan dalam kegiatan kerohanian tiap minggunya.

Kesehatan, permasalahan yang ada, yaitu kurangnya penyuluhan masyarakat mengenai penyakit baru dan penyuluhan bagi ibu hamil dan balita. Potensi yang ada, yaitu: harapan warga untuk mendapatkan informasi tentang penyakit baru dan penyuluhan bagi ibu hamil dan menyusui.

Seni budaya dan olah raga, permasalahan yang ada, yaitu: untuk seni budaya, kurangnya peralatan kesenian. Untuk olah raga, kurangnya prasarana olah raga dan kurangnya intensitas kegiatan olahraga antar warga/remaja. Potensi yang ada, yaitu: semangat warga untuk melestarikan dan mengembangkan kesenian daerahnya dan semangat warga dalam melakukan kegiatan kesenian jatilan/kuda lumping dan rebana setiap bulannya.

PKK, permasalahan yang ada, yaitu kurangnya intensitas pertemuan antar pengurus dan anggota PKK, kurangnya pelaksanaan kegiatan PKK (Program Kerja PKK), dan kurangnya pelatihan-pelatihan khususnya pada pengembangan usaha komoditas yang ada di Tanggul Harapan. Potensi yang ada, yaitu: pengurus dan anggota PKK sangat ingin menjalankan Program Kerja secara rutin, untuk memajukan PKK di daerahnya.

Karang Taruna, permasalahan yang ada adalah kurangnya intensitas pertemuan karang taruna. Potensi yang ada, yaitu: pengurus dan anggota Karang Taruna sangat ingin menjalankan kembali karang tarunanya dengan melakukan

kegiatan atau program kerja secara rutin.

Hasil dari pemetaan masalah dan potensi tersebut di atas, dapat dijadikan sebagai rumusan program dan kegiatan penyuluhan berikutnya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Lembaga PKK, adanya peningkatan kapasitas kelembagaan PKK dengan diaktifkannya kembali struktur organisasi, kepengurusan, menyusun program kerja PKK, tata kelola administrasi, arisan serta pengembangan demo pelatihan, pengembangan jaringan pemasaran lokal, serta kaderisasi PKK.
2. Lembaga Karang Taruna, peningkatan kapasitas kelembagaan Karang Taruna dengan diaktifkannya kembali struktur organisasi, kepengurusan, menyusun program kerja Karang Taruna, tata kelola administrasi, pelatihan kewirausahaan, pelatihan, serta kaderisasi Karang Taruna.
3. Lembaga Mental Spiritual, Pembentukan organisasi dan kepengurusan, SK Kepengurusan, AD/ART organisasi, daftar nama anggota, serta penyusunan rencana kerja (kegiatan) sudah berjalan dengan baik. Untuk penguatan kapasitas SDM, pengembangan jaringan akan mengikuti lomba yang berkaitan dengan mental spiritual, serta kaderisasi mental spiritual.
4. Lembaga Seni Budaya dan Olah Raga, terlaksananya pembentukan lembaga seni budaya dan olah raga, dimana untuk struktur organisasinya, Administrasi, SK Kepengurusan dibawah naungan Karang Taruna. Terjadi penguatan kapasitas SDM Pengurus dan anggota di bidang administrasi



kegiatan; penyusunan rencana kerja; dan pengembangan jejaring untuk pengadaan tenaga Pelatih kesenian baik dari Satuan Kimtrans Tanggul Harapan dan sekitarnya.

Saran

1. Diperlukan peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program-program pendampingan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi di bidang sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan pemerintah dan masyarakat.
2. Pihak pembina Satuan Kimtrans Tanggul Harapan, perlu memelihara, memanfaatkan dan memberdayakan Kader-kader terlatih dari kegiatan ini baik yang ada di lembaga pemerintah (RT/RW) maupun yang ada di lembaga masyarakat (PKK, Karang Taruna, Mental Spiritual, dan Kesenian) untuk dapat bekerja sama dengan kader-kader pemberdayaan masyarakat lainnya.
3. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah di Satuan Kimtrans Tanggul Harapan diperlukan penambahan jumlah dan ragam bantuan sarana kegiatan operasional lembaga.
4. Diperlukannya keberlanjutan akan program kelembagaan sosial budaya di lokasi Satuan Kimtrans Tanggul Harapan, agar masing-masing kegiatan kelembagaan yang sudah mulai berjalan dengan baik dapat terus berlangsung, sehingga kelembagaan menjadi kuat dan kualitas SDM semakin meningkat.
5. Diperlukannya dorongan atau motivasi khususnya SDM (baik pengurus, anggota pengurus dan warga) untuk masing-masing kegiatan kelembagaan, mengingat

sebagian besar SDM di lokasi masih belum banyak yang kooperatif untuk mengikuti kegiatan kelembagaan.

REFERENSI

- Adriani, Novi. 2013. *Kehidupan Masyarakat Transmigrasi Singkut 1 Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi (1974-2007)*. Skripsi S1. Tidak diterbitkan. Universitas Andalas.
- Hatu, Rauf. 2011. *Perubahan Sosial Kultural Masyarakat Pedesaan*. *Jurnal INOVASI*. 8 (4): 1-11.
- Nuh, Nuhri M. 2011. *Pola relasi Sosial Umat Beragama di Daerah Eks Transmigrasi: Studi Kasus di Kecamatan Sausu Parigi Moutong Sulawesi Tengah*. *Jurnal Multikultural & Multireligius*. 10 (2): 385-402.
- Rahayu, Endah Trophy. 2010. *Pertumbuhan Penduduk dan Persebaran Penduduk di Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010*. Jakarta: BPS.
- Sarwono, J. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Sasongko, Andi. 2014. *Perubahan Sosial dan Budaya Petani Sawit (Studi Deskriptif Desa Transmigran Batang Pane-I, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara, Prov. Sumatera Utara)*. Skripsi S1. Tidak diterbitkan. Universitas Sumatera Utara.
- Setiadi, Elly M. dkk. 2012. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Unit Permukiman Transmigrasi Tahun 2005;
- Pedoman Umum Pemberdayaan Unit Permukiman Transmigrasi Tahun 2008;
- Widodo, N., dan Suradi, 2007. *Penelitian Peranan Kelembagaan Lokal Dalam Pembangunan Masyarakat*. Dalam *Jurnal Depsos RI*. Vol. 25 No. 5 Tahun 2007.